

**MEREVITALISASI POLITIK DALAM KHASANAH KEHIDUPAN  
BERBANGSA DAN BERNEGARA :  
*Suatu Tinjauan Etis Politik Kristen***

***Benget Rumahorbo***  
**Benget888@gmail.com**

**Abstrak**

*Politik merupakan keharusan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua pandangan umum masyarakat tentang politik dewasa ini. Disatu pihak mengatakan bahwa politik adalah permainan kotor dan sekedar mencari kekuasaan. Politik itu juga disebut sebagai kawasan yang bebas kejujuran, sehingga didalamnya tidak ada yang lurus. Ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa dalam politik tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Pandangan-pandangan diatas tentulah membuat sebagian orang bersikap negatif terhadap politik, sehingga ada orang yang tidak mau terlibat dalam politik atau sebaliknya ada orang yang berpetualang dalam politik bahkan mereka memakai politik untuk mencari keinginan, tujuan, dengan menghalalkan segala cara. Kemudian di pihak lain ada yang mengatakan bahwa Politik itu adalah seni. Mereka mengatakan bahwa politik itu adalah bentuk pengabdian pada bangsa dan negara. Oleh sebab itu mereka juga mengklaim bahwa politik itu bertujuan untuk kesejahteraan warga negara. Dengan pandangan ini, banyak orang berjuang dalam dunia politik, atau ada orang Kristen yang mengklaim bahwa mereka aktif dalam politik adalah sebagai panggilan atau amanah pengabdian. Bagaimana politik itu menjadi alat kesejahteraan, dan mengapa politik itu sering dinilai negatif? Khususnya dalam masyarakat Kristen perlu dibahas secara hakiki dan konprehensif supaya masyarakat Kristen paham dalam berpartisipasi dalam politik secara benar.*

***Kata Kunci : Politik, merevitalisasi, peran Masyarakat Kristen.***

**Pendahuluan  
Latar Belakang**

Manusia adalah bagian dari apa yang disebut dengan komunitas. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh konteks sosialnya. Membangun dan mengembangkan komunitas juga hakekat kehidupan manusia yang perlu disangga dengan beberapa aspek, yaitu : aspek moral-etika dan aspek politik.

Adapun aspek moral-etika senantiasa bersentuhan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam kesepakatan mesyarakat setempat yang dapat ditentukan dan disepakati bersama. Apabila ada yang menyimpang dari kesepakatan tersebut, maka yang bersangkutan dengan sendirinya terpanggil untuk

merefleksikannya, ataupun dalam tataran yang lebih konstruktif perlunya rekonsiliasi.

Kehidupan yang harmoni dalam suatu pemerintahan dan hidup bernegara, selain tertatanya aturan hukum yang baik dan selalu mengedepankan keadilan juga terbangunnya suasana politik sehat. Memang politik selalu diorientasikan pada hal ikhwal kekuasaan, namun demikian ada konsep yang disebut politik kenabian. Artinya menyuarkan politik yang senantiasa benar. Dalam pengertian yang lebih jauh politik senantiasa berorientasi pada hal-hal yang bersifat moralitas.

Sangat disayangkan belakangan ini, dunia penuh dengan goncang-ganjing politik. Khususnya di Indonesia perkembangan politik yang didominasi elite politik

akhirnya sering membuat situasi tidak terkendali. Soegeng Sarjadi pendiri Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), sekaligus pengamat politik mengatakan bahwa "Masyarakat dinilai mulai ragu dengan perkembangan politik di Indonesia yang didominasi elite politik dan membuat situasi tidak terkendali. Menurutnya, politik Indonesia cenderung bertujuan mencari kekuasaan bukan kesejahteraan. "Berpolitik kian sarat perburuan rente dalam arus utama untuk kekuasaan". Beliau juga menambahkan bahwa "gambaran wajah politik kotor dalam kubangan korupsi menjadikan makin jauh amanah berp politik untuk kesejahteraan negara. Politik Indonesia kerap salah tempat dan posisi dalam etika dan moral, kekuasaan dan uang menjadi pusat utama dalam berp politik. Kekuasaan dan uang menjadi episentrum berp politik dekonstruktif yang membelokkan arah politik dari tujuan bernegara".<sup>1</sup>

Sangat menarik, kesimpulan para pengamat menggambarkan bahwa perpolitikan di Indonesia justru saling memperebutkan kekuasaan. Para pejabat yang memiliki kekuasaan kebanyakan melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu dibuat ketika kampanye justru dilupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang diperoleh. Demikian juga pihak yang tidak terpilih seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Akbar Tanjung seorang politisi senior pada sebuah media mengaku "sangat miris melihat situasi politik nasional karena komunikasi yang terbangun saat ini bersifat kepentingan sementara". "Politik sekarang sudah jauh dari nilai Pancasila. Politik sekarang sangat

pragmatis dan dipenuhi dengan kepentingan semu belaka, tidak mencerdaskan bangsa", demikian penuturan Akbar Tanjung. Akbar juga menjelaskan bahwa nilai Pancasila saat ini juga sudah jauh dari pribadi petinggi-petinggi bangsa yang lupa dengan semangat kebersamaan dan persatuan yang dituliskan dari Pancasila. Termasuk juga dengan perekonomian Indonesia, menurut Akbar kesenjangan antara si miskin dan si kaya sudah semakin jauh. Rasio tersebut terjadi karena politik di Indonesia sudah jauh dari implementasi Pancasila.<sup>2</sup>

Pendapat Akbar ini, hampir sama dengan yang dikatakan I Faujan yang mengatakan bahwa terjadinya kemiskinan pada sebuah negara, umumnya karena tatanan perpolitikan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi menjadi tersendat. *Rusaknya* tatanan dan sistem *politik suatu* negara akan berdampak pada ketidakmampuan *negara* untuk memberikan kesejahteraan karena uang yang seharusnya pembangunan tersedot untuk transaksional politik.<sup>3</sup>

Memang negara Indonesia menganut azas politik bebas dan rahasia. Namun demokrasi telah memberikan tempat tempat untuk bersaing bebas dan berkompetisi. Akhirnya transaksional politik mendominasi tatanan. Akibatnya ialah demokrasi yang terbangun adalah sistem oligarki politik karena demokrasi sendiri telah dirampok oleh para elite yang berkuasa didalam partai politik. Disana terjadi perputaran uang yang sangat besar, apalagi transaksi keuangan partai politik begitu tertutup. Maka jangan heran apabila kemudian hukum tidak responsive dan

<sup>1</sup> Diskusi bertemakan "Masa Depan Indonesia: Tantangan 20 tahun ke Depan" dan Analisis Politik 2012: "Suara Tuhan: Suara Rakyat Versus Suara Elite" di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/12/2012). Lihat : <https://nasional.sindonews.com/read/698540/12/perkembangan-politik-di-indonesia-semakinmeragukan>. Diakses 20 Januari 2018

<sup>2</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/13/akbar-tanjung-situasi-politik-saat-ini-sudah-pragmatis>. Diakses 26 Januari 2018.

<sup>3</sup> [file:///C:/Users/User/Downloads/16093-38409-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/16093-38409-1-PB%20(1).pdf) Diakses 26 Januari 2018

dunia peradilan juga korup sebab tak mungkin hukum dan peradilan itu menjadi baik jika politik yang melatarbelakanginya tidak demokratis melainkan oligarkis seperti sekarang ini.<sup>4</sup>

Lalu bagaimana supaya sistem politik kita berjalan dengan baik ? Bagaimana supaya politik itu membawa kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia ? Melalui tulisan ini, kita akan memahami konsep ataupun pemahaman yang benar tentang politik dan hukum sehingga kita dapat menempatkan diri sebagai warga Negara yang concern dan mampu ambil bagian dalam menyuarkan politik moral dan menjadi pioner dalam memberlakukan aturan hukum secara benar dan adil.

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif analisis dimana penulis memberi pemaparan, gambaran dan tinjauan mengenai politik dan revitalisasi politik khususnya masyarakat Kristen dan keterlibatannya di tengah-tengah perpolitikan Indonesia untuk membangun kesejahteraan rakyat.

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi gereja, sebab gereja sangat berfungsi sebagai tempat pembinaan iman yang memiliki tugas hakiki membina kerohanian umat untuk meneguhkan pemahaman umat khususnya tentang politik yang ber-etika dan bermoral untuk kelangsungan sebuah negara agar mampu mewujudkan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.

#### **Tinjauan Teoritis**

##### **1. Defenisi Politik.**

Politik berasal dari kata Yunani yakni *polis*<sup>5</sup> artinya penduduk (citizen). Lalu *polithia* diartikan sebagai penduduk/warga Negara/tata Negara/bentuk pemerintahan. Dalam suatu *Polis* pada zamannya setiap penduduk (*politiea*) memiliki kedudukan yang sama. Jika muncul persoalan yang menyangkut *Politheia* (penduduk) atau *polis* (negara) memiliki kedudukan yang sama. Jika muncul persoalan yang menyangkut *politheia* (penduduk) atau *polis* (negara) itu sendiri, maka kemudian berunding di auditoria (tempat berkumpul/musyawarah. Mereka saling mengemukakan pendapat lalu mengambil keputusan bersama. Sifat pengambilan keputusan bersama demi kesejahteraan itulah yang disebut dengan politik. Tidak hanya itu saja, pembicaraan berkaitan dengan perluasan wilayah, pengembangan dan pembangunan negara dari penduduk/warga Negara (*polithiea*) juga disebut dengan politik. Sebuah penduduk juga dimungkinkan melakukan ekspansi demi memperluas polis (kota) karena berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak demi perluasan kesejahteraan sosial. Dalam sebuah polis terdapat asset-aset yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan warga, misalnya tempat untuk menunjang kesehatan masyarakat di sebut dengan poliklinik. Lalu agar tercipta sebuah keamanan dan keadilan warga negara dibentuklah polisi sebagai penegak hukum. Dan tentu masih banyak asset-aset lainnya.

Dalam perkembangan berikutnya, kota-kota memperluas diri atau menyatukan diri dan kemudian disebut negara. Maka politik sangat berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola, menyusun

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, **Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 80.

---

<sup>5</sup> Anwar Bakat : **Reconstruction of political ethics in an asian perspective.**, (WWW Publications, 1983), h.53.

maupun membuat kesepakatan dalam kerangka kehidupan bersama sebuah masyarakat. Aktivitas politik ditujukan untuk menciptakan dan melaksanakan pranata-pranata sosial dan normativ yang memungkinkan masyarakat yang hidup dengan tertib, aman, tentram dan sejahtera. Agar supaya efektif dibutuhkan otoritas atau kekuasaan. Karena politik pada akhirnya berhubungan dengan kekuasaan, maka tidak mengherankan bila politik juga disalahgunakan sengaja untuk mengejar kekuasaan belaka. Dan semakin besar sebuah kekuasaan digenggam, semakin besar pula tendensi penyimpangannya. Tanpa kontrol dan pembatasan, akan mudah terjadi abuse of power.

Jadi secara umum politik<sup>6</sup> dapat diartikan sebagai seni yang bersangkutan paut dengan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berbeda-beda kepentingannya, dimana pengambilan keputusan ini menyangkut masa depan orang banyak.

Disamping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain :

- Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
- Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

## **2. Hakekat Politik**

Selayang pandang diatas telah menelaah makna dan pengertian politik. Maka di bawah ini kita juga akan mencoba

---

<sup>6</sup> Gerrit Singgih, **Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia**, BPK Gunung Mulia, 2000, hal.27.

memahami hakekat dari politik itu sendiri. Seorang filsuf republikan seperti Aristoteles atau Hannah Arendt<sup>7</sup> sangat menekankan pemisahan antara yang publik dan yang privat ketika berbicara tentang politik. Menurut mereka, politik terjadi ketika warga negara memasuki ruang publik guna bertindak secara bersama-sama untuk kepentingan bersama, dengan mengesampingkan sebarang bentuk kepentingan pribadi. Politik hakiki sangat menekankan pentingnya pengendalian atau pengendalian hasrat pribadi ketika seseorang menduduki posisi publik tertentu. Tindakan pengejaran kepentingan pribadi atau kelompok yang lazim ditemukan dalam relasi-relasi kekuasaan dengan sendirinya ditempatkan dalam kategori tindakan privat, bahkan tindakan anti politik.

Politik yang hakiki pertama-tama bukanlah persoalan bagaimana memerintah dan mengendalikan orang lain, tapi bagaimana membantu orang lain agar mampu bertindak otentik dan bersikap kritis terhadap keadaan. Politik harus mendorong warga masyarakat mengekspresikan dirinya secara aktif, kreatif, tanpa tekanan di dalam ruang sosial yang pluralistik. Politik lebih dijelaskan dalam konteks partisipasi dan solidaritas, bukan dalam konteks penguasaan dan kontrol.<sup>8</sup>

Politik hakiki ini memang sangat kontras dengan politik yang sehari-hari kita saksikan di negeri ini. Membayangkan perwujudan politik hakiki itu mungkin akan terlihat sebagai fantasi yang tidak realistis. Fantasi tentang sesuatu yang luhur dan mulia, di tengah-tengah realitas yang telah demikian bengkok dan jorok. Namun

---

<sup>7</sup> Agus Subibyo, **Hilangnya Hakekat Politik**, Koran Tempo, 27 November 2012.

<sup>8</sup> Toha, Miftah., **Birokrasi & Politik di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2007, hal. 75.

jangan-jangan kemauan berfantasi itu titik pijak yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan yang lebih akut dalam kehidupan bernegara kita. Perlu digarisbawahi, pembusukan politik di negeri ini bukan hanya disebabkan oleh perilaku eksploitatif-egoistis para pemimpin politik, tapi karena apatisme dan frustrasi terhadap realitas penyelenggaraan kekuasaan yang membuat masyarakat lupa akan politik yang hakiki. Sekedar contoh, bukan hanya para politikus yang berpikir transaksional, tapi juga masyarakat. Alih-alih melawan politik uang, masyarakat belakangan tanpa malu-malu menerimanya sebagai sebuah kelaziman.

Bicara tentang pemilu di mata banyak masyarakat kita sama hanya dengan berbicara tentang pembagian uang, sembako, bahan bangunan, pakaian gratis dari calon pemimpin. Masyarakat tidak berpikir panjang bahwa pembagian “gula-gula” itu pada saatnya nanti dapat berdampak buruk terhadap hak-hak politik dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Masyarakat juga terjangkiti problem ingatan pendek. Ada banyak politikus atau pejabat bermasalah yang mereka pilih atau mereka biarkan kembali menduduki jabatan-jabatan strategis. Apatisme atau politik transaksional jelas berbicara di sini.

Masyarakat seperti kehilangan kemampuan untuk berpikir dan mempertanyakan, sehingga pada akhirnya menerima keadaan politik yang demikian bengkok itu tanpa kritis. Inilah yang digambarkan Arendt sebagai masyarakat yang mengalami kegersangan hidup (the desert of live). Masyarakat yang kehilangan kemampuan untuk menilai secara rasional-kritis, untuk menginderaai ketidakberesan di sekitarnya, dan akhirnya larut dalam ketidakberesan itu tanpa merasa risih sama sekali.

Pendek kata, krisis hakekat politik bukan hanya terjadi pada tataran tindakan politikus dan partai politik, tapi juga pada tataran kesadaran atau persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya politik dijalankan. Krisis yang kedua ini pertama-tama harus diatasi karena dampaknya sangat serius yakni sikap permisif masyarakat terhadap segala penyimpangan dan penghianatan hakikat politik.

### **POLITIK DAN ETIKA POLITIK GEREJA**

Agar paparan ini dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih lengkap tentang politik, maka disini juga akan dilihat konsep tentang politik dan etika politik gereja. Perkataan yang berasal dari kata Yunani, *Po'lis* diartikan kota (city). Dalam perkembangan berikutnya kota-kota memperluas dirinya atau menyatukan diri dan kemudian disebut Negara. Sebagai ilmu, politik merupakan analisa tentang pemerintahan, proses-proses di dalamnya, bentuk-bentuk organisasi, lembaga-lembaga dan tujuannya. Dalam bentuk yang lebih operasioanal, politik merupakan pembuatan keputusan yang di lakukan masyarakat; suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan-kebijakan public.<sup>9</sup>

Dengan demikian politik jelas akan berbicara tentang pengaturan menyangkut hayat hidup manusia, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan kelompok-kelompok di dalamnya. Dalam perspektif ini, kebutuhan mengenai peraturan, pengatur dan pelaksana (pemerintah) adalah sesuatu yang tidak tertolak. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pada tiap Negara jelas membutuhkan dan sekaligus akan mengeluarkan pelbagai kebijakan publik, sesuai programnya. Berdasarkan kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan itu,

---

<sup>9</sup> Saut Sirait, *Etika Politik Dalam Perpestitif Alkitab*, yang mengutip Joice & William Mitchel ; *Political Analysis and Public Policy*, 1969, hal. 4-7.

muatan atau warna dari suatu pemerintahan akan terbaca.

Tidaklah salah jika dikatakan bahwa tiap kebijakan atau peraturan yang keluar dalam suatu negara, merupakan produk politik dari rezim yang sedang berkuasa. Disinilah titik krusial dari politik itu. Sebab, subjektivitas tidaklah dengan sendirinya hilang, bahkan sering dapat mencuat manakala kekuasaan membesar pada seseorang atau sekelompok orang. Paling tidak, para penguasa akan mempengaruhi rumusan dan muatan dari suatu kebijakan publik atau peraturan yang keluar pada masa pemerintahannya, baik itu ekonomi, hukum, lingkungan hidup, pendidikan dan lain sebagainya.

Dalam sejarahnya, sebagai asal kata itu, Yunani merupakan kiblat ilmu. Namun, sejarah juga tidak bisa mengabaikan kontribusi Yahudi dalam proses-proses politik itu sendiri. Gagasan-gagasan awal mengenai persaudaraan manusia (*brotherhood of man*) dan konsepsi tentang dunia yang satu (*one world*) sangat memberi inspirasi dalam lintas pemikiran politik. Banyak yang mengaitkan hal itu dengan lahirnya pemahaman monoteisme Alkitab, terutama Perjanjian Lama.

Dalam arus gagasan yang demikian, pemaknaan Koinonia dari tri tugas Gereja, jelas memiliki kesejajaran dengan pengertian po'lis itu. Bedanya adalah fundamentalnya, antara persekutuan yang didasarkan keyakinan terhadap Yesus Kristus dan persekutuan yang diikat secara politis kebangsaan, kerajaan atau bentuk-bentuk lain. Inti makna yang dapat dilihat adalah bahwa po'lis atau politik itu adalah penataan kehidupan sekelompok manusia ke arah yang mereka kehendaki. Etika merupakan pelajaran sistematis mengenai persoalan-persoalan yang paling utama dan terutama dari tindakan manusia (*human conduct*). Di dalamnya terkandung hal yang bersifat universal, yang membedakannya dengan sopan santun

yang kebanyakan bersifat local (misalnya cium tangan/sujud, dan lain-lain).

Ada dua kata kunci yang perlu dan tidak dapat dilepaskan dalam upaya memahami etika, yakni karakter dan kebiasaan. Di dalam kedua kata itulah termaktub pelbagai pengertiannya lebih menekankan pada tingkah laku manusia maka akan dikatakan etika itu adalah pengetahuan mengenai perilaku. Jika kecenderungannya pada nilai-nilai yang membentuk kepribadian (karakter), maka etika akan disebut sebagai ajaran menyangkut karakter manusia (*doctrine of human character*)<sup>10</sup>

Arena politik merupakan ruang yang sangat memungkinkan bagi pemberlakuan syalom Kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi wilayah yang sangat terbuka bagi terjadinya pemberontakan terhadap Allah. Absolutisme yang merupakan prerogative Allah semata dan tidak terbagi terhadap siapapun, ternyata sejarah bisa ditarik dan diambil paksa oleh manusia. Namun, selalu ada konsekuensi dari sikap pemberontakan itu, yang selalu merugikan pihak manusia, termasuk orang-orang saleh.

Kita dapat melihat kekerasan hati Firaun (absolutisasi) yang berujung pada pemberontakan. Kita tidak disodorkan Alkitab jumlah korban, baik fisik material maupun jiwa. Hitler dengan keyakinan Arianisme (absolutisasi) mengakibatkan ratusan ribu nyawa melayang, termasuk orang-orang saleh. Termasuk dictator-diktator di Negara-negara berkembang yang memakan anak-anak bangsanya.

Etika politik sesungguhnya berbicara pada tataran nilai tentang Negara dan proses-proses yang manusiawi di dalamnya. Kesadaran tentang keberdosaan manusia dan kecenderungan untuk menjadi ilah, membuka kesadaran perlunya batas-batas

---

<sup>10</sup> Saut Sirait, *Etika Politik Dalam Perspektif Alkitab*, yang mengutip pada Emil Bruner; *The Divine of Imperatif*, 1947, hal. 83

etis menyangkut proses dan perilaku politik dalam suatu negara. Karena itu politik tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja, hanya sekedar diurus orang-orang tertentu atau diserahkan kepada para politisi semata.

Lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat, terutama kelompok-kelompok kepentingan, termasuk lembaga keagamaan, merupakan kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi kebijakan public atau keluarnya suatu peraturan. Lembaga-lembaga yang ada itu dapat mendengar dan menyalurkan pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat pelbagai keprihatinan dan aspirasi yang ada di tengah-tengah sekelompok masyarakat untuk menekan penguasa memberi perhatian atau mengeluarkan kebijakan pada tuntutan masyarakat tersebut.

Keterlibatan politik secara kritis (*critical engagement*) dari lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat akan menjadi sarana dan alat yang sangat efektif untuk mengontrol segala tingkah pongah penguasa dan dengan itu batas-batas etis kekuasaan yang layak tetap terjaga. Upaya-upaya melakukan kritik, menekan pemerintah dan melakukan control, jika dilakukan secara berkesinambungan dan hormat, jelas akan membiasakan suatu bangsa dan negara hidup dalam kesinambungan yang terukur. Juga, pemerintah akan dididik untuk tunduk pada yang seharusnya.<sup>11</sup>

Pendidikan politik suatu bangsa akan berjalan dengan baik di dalam dan melalui proses kesadaran kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk terus-menerus membiasakan diri melakukan kritik dan kontrol terhadap proses politik yang sedang berjalan. Suatu

bangsa atau negara, yang berjalan dalam situasi demikian, akan membiasakan dirinya terbuka dan siap melakukan perbaikan. Di samping itu, politik tidak akan menjadi suatu potret seram yang menakutkan, tetapi sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja. Kritik tidak akan dianggap sebagai ancaman, dan para pengkritik tidak diperlakukan dengan musuh.

Perubahan-perubahan yang dilakukan penguasa terhadap kebijakannya yang salah atas desakan masyarakat merupakan pendidikan politik yang paling baik. Dengan itu akan lahir kebiasaan yang positif, yang pada akhirnya akan berujung pada suatu karakter politik yang terbuka dan mau berubah ke arah yang lebih baik dan maju. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berjalan dalam pemerintahan itu, akan menjadi etika politik suatu bangsa.

**POLITIK DALAM KACA MATA ALKITAB :  
*sebuah solusi dari pergumulan Teologi Etis  
– Politik Kristen.***

Sampai saat ini, ada dua pandangan Alkitab tentang politik. Namun demikian bukan berarti bertentangan satu sama lain, melainkan saling melengkapi. Pandangan tersebut sebagai berikut :

**a. Pemerintahan Politik berbeda dengan pelayanan Kristiani**

Yakobus dan Yohanes pernah meminta jabatan khusus kepada Yesus, yaitu : kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus (Markus 10:37) tetapi Yesus mengatakan : “kamu tidak tau apa yang kamu minta...” (10:38). Mengapa Yesus menjawab demikian ?

Rupanya kedua murid ini menyangka Kerajaan Yesus adalah seperti kerajaan dunia (politik). Kemudian Yesus berkata kepada seluruh muridNya “kamu tau bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya

<sup>11</sup> Dwiyanto, Agus., **Reformasi Publik di Indonesia**, Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 79.

dengan **tangan besi** dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya **dengan keras**, atas mereka. "Tidak demikian diantara kamu ! Barangsiapa ingin menjadi besar diantara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu... karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang" (Mark.10:42-45). Dengan penjelasan Yesus diatas, ditegaskan bahwa pelayanan kristiani berbeda dengan pemerintahan politis. Yesus datang ke dunia membawa pola dan suasana baru tentang jabatan, kuasa dan pelayanan. Jabatan dan kuasa dalam pelayanan kristiani adalah berdasar pada pengabdian dan pengorbanan bagi banyak orang. Sedangkan pada politik kekuatan dan kekuasaan menjadi pola kepemimpinan yang sah.

**b. Orang Kristen tidak anti pemerintahan politik**

Ada orang Kristen yang apriori terhadap pemerintahan politik, dan menganggap pemerintahan politik sebagai penguasa yang berasal dari iblis. Mereka menggunakan Nas Alkitab Wahyu 13:1-10 sebagai dasar penilaian. Ciri-ciri pemerintahan yang berasal dari si iblis adalah : penuh kesombongan dan menghujat Allah ; melawan orang kudus.

Memang dalam sejarah gereja pernah terjadi perilaku dan tindakan-tindakan penguasa politik yang menghujat Allah dan menindas orang-orang Kristen, misalnya : Kaisar Nero dalam kerajaan Romawi abad I. Tetapi peristiwa itu bukan menjadi alasan Kristen untuk menolak pemerintahan politik secara mutlak.

Pada masa Yesus, ada kelompok-kelompok masyarakat Yahudi yang mencoba mempertentangkan Yesus dengan pemerintahan politik, "beberapa orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus : "Apakah diperbolehkan membayar pajak

kepada Kaisar atau tidak ? Haruskah kami bayar pajak atau tidak ? Kemudian Yesus menjawab dengan tegas : "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." (Markus 12:13-17).

Dengan pernyataan Yesus itu berarti orang Kristen tidak anti kepada pemerintahan politik. Malahan dan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13:1-7, ditegaskan lagi : "Tiap-tiap orang harus tahluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah". Selanjutnya Paulus mengatakan, supaya orang Kristen : membayar pajak kepada yang berhak menerima pajak; membayar cukai kepada yang berhak menerima cukai; memberi rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut; dan memberi rasa hormat kepada yang berhak menerima rasa hormat (Roma 13:7).

Darimana mandat politik orang Kristen ? Melalui Yohanes 17, dapat diketahui bahwa Yesus khusus berdoa agar Bapa tidak mengambil para pengikutNya dari dunia. Ia meminta kepada Bapa untuk menguduskan mereka dengan kebenaran yakni dalam kebenaran dan keadilan. Yesus menghendaki mereka menjadi terang dan garam dunia (Matius 5:13-16).

Dengan menyimak kata dunia yang dapat berupa *kosmos* (tempat manusia hidup) dan *aion* (sistem atau struktur), kehadiran pengikut Kristus harus menjadi berkat bagi manusia dan lingkungannya, serta bagi system (sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan budaya). Maka dalam hal ini, berarti masyarakat Kristen wajib harus berperan serta secara aktif dalam pembangunan politik bangsa untuk menciptakan masyarakat baru yang berdasarkan keadilan. Kehadiran umat Kristen dalam dunia ini mempunyai tugas



khusus sebagai penegak kebenaran dan keadilan melalui suara kenabian.<sup>12</sup>

Dengan demikian masyarakat Kristen harus berada di dalam dunia untuk menyaksikan Injil keselamatan dan memperbaharui sistem pemerintahan melalui perjuangan politik yang bersifat dialogis. Sebagai terang dan garam, para pengikut Yesus tidak boleh bersifat eksklusif dan harus mampu hidup bersama dengan golongan masyarakat lainnya. Sebab dalam praktek berpolitik tentu tidak lepas dari kecurangan dan penyimpangan, malahan ada orang-orang dengan sadar melakukan trik-trik politik yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, oleh karena itu jika orang Kristen berpartisipasi dalam politik, maka harus berani menjadi garam dan terang dunia.

Demikian juga agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab, maka orang Kristen sebagai warga negara yang bertanggungjawab wajib ikut berpartisipasi secara aktif. Dalam Markus 12:17, Yesus menegaskan : “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah”. Pernyataan ini menuntut keseimbangan dalam bertindak. Menekankan keseimbangan moral dan hukum. Yesus mengajar murid-muridNya untuk bertindak adil, artinya memberikan kepada pemerintah dan Allah sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya.

Salah satu bentuk partisipasi Kristen adalah mendoakan pemerintah. Rasul Paulus berkata, “Naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan” (1Timotius 2:1-2). Yesus pun

meminta agar para muridNya mendoakan para penguasa supaya mereka tidak memerintah dengan tangan besi, tetapi dengan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketulusan (Markus 10:41-45).

Dalam Roma 13:4, Rasul Paulus berkata bahwa pemerintah adalah hamba Allah, dan orang Kristen harus tahluk kepadaNya. Pemerintah, sebagai hamba Allah, berjuang untuk keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang golongan. Pemerintah dipanggil sebagai pelayan Tuhan yang melayani dan bertanggungjawab. Pemerintah harus menjalankan kuasa berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sebagai hamba Allah, para penguasa tidak boleh memerintah dengan kekerasan dan tangan besi (Markus 10:41-45).

Sebagai seorang Hamba kebenaran dan keadilan, Yesus menganjurkan kepada para pengikutnya tidak memerintah dengan kekerasan dan tangan besi. Ia berharap agar murid-muridNya tidak berkolusi dengan siapapun, dan juga tidak melibatkan diri dalam tindakan manipulasi korupsi. Dari semua tindakanNya, Yesus menunjukkan keberpihakanNya kepada golongan miskin dan tertindas. Yesus tidak mau berkolusi dengan golongan Farisi, Saduki dan ahli Taurat untuk menindas kaum lemah. Ia menuntut mereka agar menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etis dalam semua bidang kehidupan sehingga semua tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Tanggungjawab moral kepada Allah dan tanggungjawab etis kepada sesama ini bersifat integral.

Tunduk kepada pemerintah juga bukan berarti melakukan semua perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kebenaran dan keadilan. Yesus meminta para pengikutNya untuk berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan. Yesus meminta para pengikutNya untuk berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan serta

<sup>12</sup> Rebecca Manlay Pippert., **Keluar dari Tempat Garam ke Dalam Dunia**, Malang : Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010, hal. 50.

tetap berusaha menyuarakan suara kenabian dalam situasi apapun, seperti yang telah dilakukan para nabi dan juga oleh Yohanes Pembaptis. Kehadiran Yesus di tengah masyarakat akan menjadi garam dan terang, dan berusaha menghadirkan misi Kerajaan Allah (Lukas 4:18-19) secara utus, serta berpijak pada Matius 22:37-39), “mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri”.

Mengasihi sesama manusia telah diterjemahkan oleh Petrus dengan “kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang” ( 2 Petrus 1:7). Oleh karenaNya, pengikut Yesus tidak hanya berjuang untuk golongannya sendiri, melainkan untuk semua golongan manusia. Hal ini telah dibuktikan oleh Yesus sendiri ketika Ia memberi makan lima ribu dan juga empat ribu orang, menyembuhkan orang sakit, dan melayani manusia tanpa membedakan warna kulita. Dengan demikian, pemuridan tidak hanya dimengerti dari satu sisi saja-yaitu dari sudut keselamatan jiwa- tetapi juga dari sisi lain seperti menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memulihkan penglihatan bagi tahun rahmat Tuhan. Maka misi Kristiani mencakup pelayanan Injil keselamatan, penegakan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, pengangkatan harkat dan martabat manusia melalui perjuangan HAM, percepatan pembangunan bangsa, dan pelestarian lingkungan hidup<sup>13</sup>.

Gereja dan orang Kristen harus mampu mengupayakan penafsiran yang komprehensif holistic terhadap Matius 28:19-20, Markus 10:41-45 dan Markus 16:15-16, Lukas 4:18-19 dan Yohanes 17, agar mampu melaksanakan misi Allah yang dijalankan Yesus Kristus dan dimandatkan kepada setiap orang Kristen. Gereja Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, umat Allah, dan masyarakat gereja, yang

dikepalai oleh Yesus sendiri, mempunyai tugas khusus sebagai saksi Kristus dalam memprakarsai lahirnya masyarakat baru yang berdasarkan kebenaran dan keadilan. Masyarakat Kristen berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Menjadi orang Kristen berarti siap mengemban misi Kristus, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang bengkok. Istilah “dunia” dapat dihubungkan dengan kejahatan struktural seperti rekayasa politik, kekuasaan, peradilan dan semua bentuk rekayasa yang merugikan masyarakat. Dalam konteks inilah orang Kristen masyarakat Kristen harus benar-benar harus menjadi garam dan terang dunia. Dengan demikian juga tugas panggilan Gereja dalam bidang politik yaitu menegakkan keadilan di bumi Indonesia. Adapun hal-hal yang perlu dipikirkan dan diperjuangkan adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Melindungi dan menghargai manusia ciptaan Allah
- b. Mempromosikan dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah.
- c. Mempromosikan dan memperjuangkan persamaan hak manusia.
- d. Memperjuangkan hak dan kemerdekaan seseorang untuk memilih dan dipilih
- e. Memperjuangkan hak asasi beribadah dan bersekutu
- f. Berdampingan dengan suku-suku bangsa melaksanakan pembangunan bangsa
- g. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia
- h. Memperjuangkan iklim demokrasi yang sehat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

<sup>14</sup> Saut Sirait, **Etika Politik Dalam Perpestitif Alkitab**, yang mengutip Joice & William Mitchel ; **Political Analysis and Public Policy**, 1969, hal. 20

<sup>13</sup> Rebecca Manlay Pippert., **Keluar dari...**hal. 48

- i. Berjuang untuk mengentaskan kemiskinan melalui perjuangan menegakkan keadilan hukum.

Dalam melaksanakan tugas yang berat seperti ini, Gereja sebagai tubuh Kristus mempunyai beban berat untuk menata diri sendiri. Keberadaan gereja sendiri masih terlalu primordial, egois, eksklusif dan terpecah belah. Masyarakat Kristen belum mampu berpolitik dan berdialog, masih berkompetisi antas denominasi karena didorong oleh rasa superioritasnya.

Oleh karena itu, gereja Tuhan juga harus berani dan mampu menilai diri sendiri serta mawas diri dan bertobat sehingga mampu menjadi pelaku Firman Allah secara bertanggungjawab. Gereja sebagai agen Kerajaan Allah harus berjuang keras mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sebagai agen pembaru, gereja turut bertanggungjawab menerangi dan memperbaharui sistem dan struktur sosial yang sudah terpolusi oleh dosa. Di satu pihak, gereja perlu membenahi diri agar terjadi perseketuan doa persatuan, tetapi di lain pihak, gereja harus turut berjuang membela keadilan, pemerataan ekonomi dan menciptakan kestabilan politik. Dengan prinsip ini, Gereja Tuhan dan masyarakat Kristen tidak akan melakukan tindakan-tindakan korupsi, kolusi, manipulasi, kronisme dan nepotisme.

#### **PENUTUP**

Melalui pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat politik sesungguhnya adalah baik. Tujuannya untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa politik tatanan pemerintahan sebuah negara tidak akan berjalan dengan benar. Oleh sebab itu sebagai masyarakat Kristen perlu berpartisipasi dalam politik, baik struktural maupun praktis di Indonesia. Agar revitalisasi perpolitikan dapat tertolong dengan maka sebagai orang Kristen perlu bersikap :

1. Menyadari posisinya sebagai warga negara yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara.
2. Masyarakat Kristen harus berpartisipasi sebagai garam dan terang dalam dunia politik.
3. Masyarakat Kristen harus melakukan Tri Tugas orang Kristen di dunia politik yakni : Bersaksi ( harus berani memberi masukan berupa saran, kritik ataupun proses). Bersekutu (melarut dalam dunia politik agar efektif) dan Melayani (memberi diri untuk orang lain).
4. Masyarakat Kristen harus mendoakan dan mendukung Penguasaan Negara.
5. Masyarakat Kristen harus aktif menjadi pekerja sosial ( mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial).

#### **BAHAN RUJUKAN**

- \_\_\_\_\_, Jurnal Yayasan Lembaga Sabda : **Politik Dalam Kacamata Perjanjian Baru**, 1998.
- Bakat, Anwar., *Reconstruction of political ethics in an asian perspective.*, (WWW Publications, 1983.
- Dwiyanto, Agus., **Reformasi Publik di Indonesia**, Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press, 2006
- Davies, Peter., **Hak-Hak Asasi Manusia**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Joice & William Mitchel ; **Political Analysis and Public Policy**, 1969
- Mahfud MD, Moh., **Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu**, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Sirait, Saut., **Politik Kristen Di Indonesia : Suatu Tinjauan Etis.**, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000.

Singgih, Gerrit., **Iman dan Politik Dalam Era Reformasi di Indonesia**, BPK Gunung Mulia, 2000

Subibyo, Agus., **Hilangnya Hakekat Politik**, Koran Tempo, 27 November 2012.

Toha, Miftah., **Birokrasi & Politik di Indonesia**, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2007.

Rebecca Manlay Pippert., **Keluar dari Tempat Garam ke Dalam**

**Dunia**, Malang : Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2010.

<https://nasional.sindonews.com/read/698540/12/perkembangan-politik-di-indonesia-semakin-meragukan>.  
<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/13/akbar-tandjung-situasi-politik-saat-ini-sudah-pragmatis>. Diakses 26 Januari 2018.  
file:///C:/Users/User/Downloads/16093-38409-1-PB%20(1).pdf